

ANALISIS TRANSPORTASI LAUT DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA TUAL

Marwan Rahajaan

Email: anggasyahputra511@gmail.com

Mastania

Emal: mastaniamanaf6@gmail.com

Hj.Syamsiah Ingratubun

Email: syamsiahingratubun2017@gmail.com

ABSTRACT

Development performance is reflected in the achievement of how much and the rate of economic growth in an area. The purpose of this study is (1) to determine the effect of sea transportation on economic growth in Tual City (2) to determine the effect of the ministry of transportation government spending on economic growth in Tual City. This study uses 5-year time series data from 2016-2020, using multiple linear regression models.

The results of this study indicate that (1) sea transportation has an effect on economic growth in Tual City during the study period (2) government spending affects economic growth in Tual City during the study period.

Keywords: *Sea transportation flows, government spending and economic growth*

ABSTRAK

Kinerja pembangunan tercermin dari pencapaian seberapa besar dan laju pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pengaruh transportasi laut terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Tual (2) untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah kementerian perhubungan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Tual. Penelitian ini menggunakan data time series 5 tahun dari tahun 2016-2020, dengan menggunakan model regresi linear berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) transportasi laut berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Tual selama periode penelitian (2) pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Tual selama periode penelitian.

Kata kunci : **Arus Transportasi Laut, Pengeluaran Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi**

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan, yang sering disebut pula sebagai negara maritim terbesar di dunia. Indonesia terdiri dari 17.508 pulau yang tersebar dari Sabang yang terletak paling ujung barat sampai Merauke di ujung pulau Papua, sepanjang sekitar 5.000 kilometer, dan melintang dari pulau Miangas dan pulau Marore yang terletak paling ujung selatan sepanjang sekitar 2.000 kilometer, luas wilayah Nusantara Indonesia mencapai sekitar 8,5 juta kilometer persegi, wilayah perairan/lautnya adalah sekitar dua pertiga dari total wilayah Indonesia, sisanya atau sesepertiganya merupakan wilayah daratan (Adisasmita, 2010)

Dengan kondisi wilayah geografis yang sangat luas serta topografi Indonesia yang saling terpisah oleh lautan, serta tingginya kapasitas kerja dilaut sangatlah penting dan menjadi perhatian, pembangunan dan pengelolaan infrastruktur laut yang baik tentunya dapat memacu pembangunan.

Sebagai negara kepulauan yang jangkauan antar daerah yang beragam, serta melihat sebagian besar masyarakat yang dalam aktivitas ekonominya memilih jalur laut sebagai alternatif yang paling mudah dan murah untuk dijangkau. Fakta bahwa transportasi dapat menjadi hambatan dalam pembangunan itu sendiri, dan bisa menjadi peluang bagi masyarakatnya. Hambatan bagi masyarakat yakni melalui perdagangan yang tidak stabil dikarenakan tidak tersedianya jalur laut yang mendukung arus moda barang dan penumpang demi memenuhi kebutuhan daerah, sedangkan transportasi menjadi peluang bagi masyarakat yakni dengan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai maka aktivitas perhubungan antar daerah dapat dijangkau, kebutuhan masyarakat akan pangan sandang dan papan dapat

terpenuhi. Arus transportasi perhubungan tersedia sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka memperlancar arus penumpang dan barang dapat terjangkau.

Fungsi transportasi adalah untuk mengangkut penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Kebutuhan akan angkutan penumpang tergantung fungsi bagi kegunaan seseorang (*personal place utility*). Seorang dapat mengadakan perjalanan untuk kebutuhan pribadi atau untuk keperluan usaha. (Abdul Kadir, 2006)

Dalam beberapa isu dan permasalahan dalam penyediaan infrastruktur antara lain: investasi pada infrastruktur memiliki prospek keuntungan yang relatif belum pasti yang menyebabkan partisipasi swasta yang masih rendah. Semakin tinggi jumlah penduduk di desa maupun dikota tentunya memacu arus komoditas dan menuntut penyediaan infrastruktur, keberadaan infrastruktur sangat diperlukan sebagai *precondition* kegiatan pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat (Widodo, 2006)

Peranan pemerintah disini adalah sebagai penyedia layanan publik bagi masyarakat melalui alokasi anggaran pengeluaran pemerintah yang bersumber dari pusat maupun daerah. Secara luas dapat dijelaskan bahwa dengan ketersediaan sarana infrastruktur transportasi yang memadai, namun dengan dukungan kebijakan pemerintah sehingga mendorong kegiatan perekonomian dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Hal ini yang menjadi perhatian penting bagi wilayah Maluku yang akan menjadi objek pembahasan penelitian khususnya di Kota Tual. Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara merupakan daerah yang saling terhubung, sehingga kegiatan

perekonomianpun saling mengisi antar kedua daerah ini. Sebagai contoh hasil pangan berasal dari kecamatan-kecamatan di Kota Tual, sebaian berasal dari kepulauan kei besar di Kabupaten Maluku Tenggara.

Tingginya kegiatan ekonomi antar daerah tersebut tentu memiliki keterkaitan antar sektor-sektor ekonomi dari daerah-daerah di Kota Tual, peran pemerintah dalam menyediakan infrastruktur pelabuhan dalam memperlancar kegiatan perekonomian dan ketersediaan transportasi yang memadai sehingga dapat menjawab kebutuhan masyarakat dalam memperlancar kegiatan perekonomian masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumberdaya nasional yang memberikan kesempatan bagipeningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat yang makmur dan sejahtera dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, pemerintah provinsi sebagai kordinator mempunyai kewenangan dan bertanggungjawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat (Kuncoro, 2009:43, dalam Kusriyawanto, 2014).

S. Kuznet (1996) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu

negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Prof. Beaur menjelaskan bahwa penentuan utama pertumbuhan ekonomi adalah bakat, kemampuan, kualitas, kapasitas dan kecakapan, sikap, adat istiadat, niali, tujuan dan motivasis, serta struktur politik dan kelembagaan (Jhingan, 2013).

Transportasi

Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS)

Menurut Adisasmita (2010) dalam bukunya menjelaskan bahwa Sistem Transportasi Nasional (sistranas) adalah tatanan transportasi yang terorganisir secara kesisteman, yang terdiri dari tranportasi jalan, transportasi kereta api, transportsi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut, transportasi udara, serta transportasi pipa, yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir yang membentuk suatu sistem pelayanan jasa tranportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan/atau barang yang terus berkembang secara dinamis. Sistranas diselenggarakan berdasarkan landasan ideal pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, landasan visional wawasan nusantara, landasan konsepsional Ketahanan Nasional, landasan operasional peraturan perundang-undangan dibidang transportasi, serta peraturan perundangan lain yang terkait.

Selanjutnya menurut Adisasmita (2010) bahwa tujuan SISTRANAS adalah tewujudnya transportasi yang efektif dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas manusia, barang dan jasa, membantu terciptanya pola distribusi nasional yang

mantap dan dinamis, serta mendukung pengembangan wilayah, dan lebih memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka perwujudan wawasan nusantara dan peningkatan hubungan internasional.

Moda Transportasi dan Infrastruktur Transportasi

Jaringan transportasi dapat dibentuk oleh moda transportasi jalan, kereta api, sungai dan danau, penyeberangan, laut, udara, dan pipa. Masing-masing moda transportasi memiliki karakteristik teknis yang berbeda, pemanfaatannya disesuaikan dengan kondisi geografis daerah layanan. *Moda transportasi jalan*, memiliki karakteristik utama yaitu fleksibel dan mampu memberikan pelayanan dari pintu ke pintu. *Moda transportasi kereta api* memiliki keunggulan yaitu daya angkut tinggi, polusi rendah, keselamatan tinggi, dan hemat bahan bakar. *Moda transportasi sungai dan danau* memiliki karakteristik kecepatan rendah dan murah dengan tingkat polusi rendah. *Moda transportasi penyeberangan* mempunyai karakteristik mampu mengangkut penumpang dan kendaraan dalam jumlah besar serta kecepatan relatif rendah dengan tingkat polusi rendah. *Moda transportasi laut* mempunyai karakteristik mampu mengangkut penumpang dan barang dalam jumlah yang besar, kecepatan rendah dan jarak jauh dengan tingkat polusi rendah. *Moda transportasi udara* mempunyai karakteristik kecepatan tinggi dan dapat melakukan penetrasi asampai keseluruh wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh moda transportasi lain. *Moda transportasi pipa* tidak digunakan untuk transportasi umum, sifat pelayanannya terbatas hanya untuk angkutan komoditas curah, cair dan gas, dengan sifat pergerakan hanya satu arah (Adisasmita, 2020)

Jaringan Transportasi Laut Sebagai Interaksi Pembangunan

Kapal-kapal yang melayani transportasi antar pelabuhan melalui alur pelayanan disebut sebagai trayek pelayaran, trayek pelayaran tersebut membentuk jaringan transportasi laut. Kapal-kapal pengangkut manusia maupun barang dari pelabuhan asal menuju pelabuhan tujuan tentunya terdiri dari berbagai jenis, meliputi komoditas hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan serta barang hasil industri manufaktur, untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Selain itu banyak kegiatan penunjang yang terkait dengan transportasi maritim, misalnya kegiatan pelabuhan (yaitu bongkar muat, pergudangan, ekspedisi muatan angkut laut (EMKL), kegiatan logistik kapal, serta kegiatan industri galangan kapal, serta terkait pula dengan aktivitas perdagangan ekspor impor dan antar pulau. (Adisasmita, 2010)

Pengeluaran Pemerintah

Peran pemerintah menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam. Menurut teori dasar pertumbuhan ekonomi Neoklasik dari Solow dan Swan (dalam Ma'ruf dan Wihastuti, 2008) tidak terdapat pengaruh peran pemerintah terhadap pertumbuhan baik dalam bentuk pengeluaran maupun pajak (Kneller et al., 1999).

Menurut Adam Smith pemerintah memiliki tiga fungsi utama dalam mendukung perekonomian yaitu (1) memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan; (2) menyelenggarakan peradilan; dan (3) menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti infrastruktur dan fasilitas umum. Pemerintah membutuhkan anggaran untuk menyelenggarakan fungsinya dengan baik dan mekanisme penyelenggaraannya anggaran tersebut dilakukan melalui kebijakan fiskal.

Kebijakan fiskal mencerminkan besaran, pertumbuhan, maupun struktur dari anggaran pemerintah yang dianut oleh suatu negara.

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah sehubungan dengan tingkat pembelian pemerintah, transfer dan struktur pajak. Kebijakan fiskal juga dapat dipahami sebagai kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah melalui merubah-ubah (menaikkan atau menurunkan) penerimaan negara dan atau pengeluaran negara dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Ruang lingkup kebijakan yaitu pada sektor pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak sehingga disebut juga sebagai kebijakan anggaran. Secara umum tujuan dari kebijakan fiskal yang ingin dicapai antara lain: peningkatan pendapatan nasional, peningkatan kesempatan kerja, penurunan laju inflasi, penurunan defisit neraca perdagangan, penurunan defisit neraca pembayaran internasional. Besarnya pengeluaran pemerintah yang memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki batas tertentu. Pengeluaran pemerintah akan mendukung pertumbuhan ekonomi apabila pemerintah mampu menciptakan kondisi di mana besarnya share pengeluaran pemerintah terhadap tingkat output seluruhnya dapat digunakan untuk menyediakan barang publik yang digunakan sebagai input produksi yang kompetitif. (Ma'ruf dan Wihastuti, 2008)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari tahun 2016-2020. Dengan menggunakan alat analisis *regresi linear* berganda, dengan variabel penelitian: X_1 transportasi laut, X_2 pengeluaran pemerintah dan variabel Y pertumbuhan ekonomi. selanjutnya untuk menguji koefisien determinasi (R^2) serta melakukan Uji F

untuk menguji secara serempak dan Uji T untuk menguji secara parsial antar variabel yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transportasi Laut

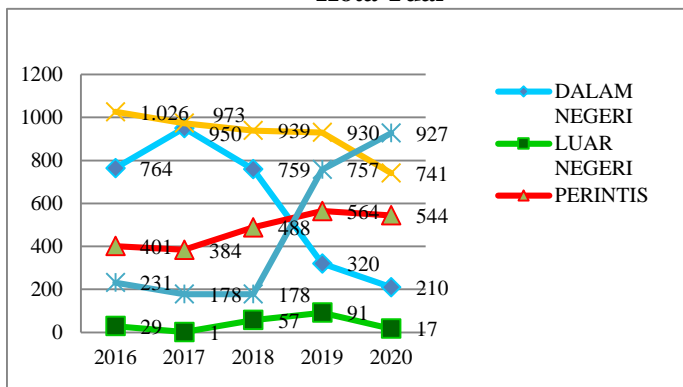
Sekitar 90% angkutan kargo di dunia diangkut melalui laut dan sekitar 40% nya akan melalui perairan Indonesia (Dirjen Perhubungan Laut, 2020). Dilansir dari data Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada Dirjen Perhubungan Laut (2014) bahwa transportasi laut menjadi urat nadi perekonomian nasional karena transportasi laut memiliki peran yang sangat penting bagi negara kepulauan. Mengingat sangat vitalnya transportasi bagi perekonomian, maka transportasi laut harus dikembangkan secara efektif dalam menunjang perekonomian daerah.

Transportasi laut memiliki peran penting dalam memperlancar arus barang dan arus penumpang antar wilayah, mengingat wilayah Maluku merupakan daerah kepulauan khususnya di Kota Tual yang menjadi objek penelitian.

Kota Tual terdiri dari 5 Kecamatan yang diantaranya harus dijangkau dengan moda transportasi laut. Umumnya masyarakat menggunakan moda transportasi laut pelayaran perintis dan pelayaran rakyat. Adapun kapal-kapal motor yang beroperasi secara reguler, kapal perintis, juga kapal-kapal PT. Pelni dan kapal ferry yang dioperasikan PT.ASDP, kebutuhan akan transportasi laut ini tentunya menjadi prioritas bagi penduduk sehingga jumlah armada laut yang ada tentunya dapat mengimbangi kebutuhan masyarakat di Kota Tual. Transportasi yang beroperasi di wilayah Kota Tual cukup banyak. Berikut Moda transportasi laut yang beroperasi antara lain Kapal Perintis, Pelra (pelayaran rakyat), Pelsus (pelabuhan khusus), dalam negeri dan luar negeri. Berikut

data arus transportasi laut di Kota Tual di tahun 2016-2020, antara lain:

Grafik 1.
Jumlah Arus Transportasi Laut Di Kota Tual



Sumber : UPP Kelas II Tual, 2021

Arus pelayaran yang terbanyak yakni pada pelayaran rakyat (Pelra), berikut kapal pelayaran rakyat yang beroperasi di Kota Tual antar lain:

1. MV. Telaga Express dengan rute Elat – Tual PP
2. KM. Tiberias – V dengan rute Elat – Tual PP
3. KMC. Cantika Inova dengan rute Tual - Elat PP
4. MV. Marina Syahputra – 1 dengan rute Tual - Elat PP
5. KM Mutiara Rute Tual - Elat PP

Data kapal-kapal perintis diatas yang beroperasi setiap hari adalah MV. Marina Syahputra, MV. Telaga Express, KMC. Cantika Inova, sedangkan KM. Tiberias, dan KM Mutiara beroperasi dalam 1 bulan hanya kali. Sedangkan untuk kapal asing yang masuk di pelabuhan khusus berasal dari berbagai negara Jerman, Swiss, Australia, Kanada, Austria, Kuba dan Spanyol yang beroperasi di wilayah Maluku.

Dengan tingginya arus transportasi laut tersebut yang menghubungkan pelayaran antar wilayah, maka berbagai kegiatan masyarakat dapat berjalan dengan lancar, khususnya para pedagang yang mengangkut hasil pertanian maupun ternak yang hendak dijual di

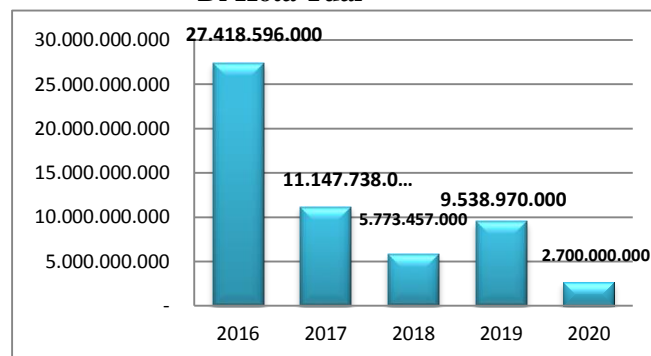
daerah tujuan sehingga kebutuhan hidup masyarakat dapat terpenuhi, para pedagang yang berasal dari pulau-pulau dapat dengan lancar memperjual belikan hasil pertanian di Kota dan daerah sekitar. Selain itu, dengan lancarnya arus transportasi dapat memacu sektor-sektor lain yang memiliki keterkaitan dan saling berhubungan satu dengan yang lain.

Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah berperan untuk menyediakan kebutuhan masyarakat, sehingga dengan ketersediaan infrastruktur transportasi laut yakni sarana dan prasarana maka memperlancar arus transportasi barang maupun untuk kenyamanan penumpang. Sebagaimana kita ketahui bahwa pengeluaran pemerintah yang dinyatakan dalam belanja pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam proyek yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, peningkatan kesejahteraan dan program yang menyentuh langsung kawasan terbelakang.

Berikut pagu anggaran Kementerian Perhubungan Laut untuk pengembangan infrastruktur perhubungan laut di Kota Tual di tahun 2016-2020:

Grafik 2.
Alokasi Anggaran Kementerian Perhubungan Laut Di Kota Tual



Sumber: UPP Kelas II Tual, 2021

Berikut penjelasan dari kegiatan dari adanya alokasi anggaran yang berasal dari kementerian perhubungan Republik Indonesia adalah berbagai program yang dianggarkan untuk pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana di Kota Tual antara lain: Pekerjaan replacement Dermaga dan Trestel Fasilitas Pelabuhan Laut Tual, Pekerjaan rehabilitasi gedung kantor UPP Kelas II Tual, Pembangunan fasilitas Pelabuhan laut Tual, Rehabilitasi Fasilitas darat pelabuhan Elat dan pelabuhan Kur, Replacement dan rehabilitasi fasilitas pelabuhan laut Tual, Rehabilitasi fasilitas darat pelabuhan Tual, Pekerjaan rehabilitasi dan perbaikan fasilitas dermaga dan trestel pelabuhan Tual, Pekerjaan rehabilitasi fasilitas Pelabuhan Elat, Tayando dan Kur.

Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan perekonomian Kota Tual dapat terlihat dari nilai PDRB yang dimiliki. Jika dilihat berdasarkan PDRB harga konstan di Kota Tual tahun 2020 mencapai 1,49 triliun rupiah, atau secara nominal mengalami penurunan sebesar 2,73 miliar rupiah dari tahun 2019 (BPS, 2020). Penurunan nilai PDRB ini disebabkan karena dampak Pandemi Covid-19 sehingga berpengaruh pada sebagian besar lapangan usaha.

Berdasarkan data Publikasi BPS bahwa Perekonomian sangat dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2020 berada pada lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas, yaitu sebesar 5,94 persen. Diikuti oleh lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, yaitu sebesar 4,42 persen. Sebagian besar laju pertumbuhan ekonomi lapangan usaha di Kota Tual pada tahun 2020 berada pada angka negatif, yang berarti, perekonomian pada lapangan usaha di

Kota Tual mengalami kontraksi dari tahun sebelumnya.

Analisis Data

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil perhitungan maka secara statistik dapat dijelaskan hubungan setiap variabel, transportasi laut (X_1) dan pengeluaran pemerintah (X_2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y), berikut hasil uji regresi:

Tabel 1
 Hasil Perhitungan Regresi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,981 ^a	,962	,924	28336,50064
a. Predictors: (Constant), X2, X1				
b. Dependent Variable: Y				

Sumber : Hasil olahan data SPSS, 2021

Berdasarkan hasil maka nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.962 yang berarti bahwa variabel bebas arus transportasi laut (X_1) dan pengeluaran pemerintah kementerian perhubungan laut (X_2) dapat menjelaskan variasi variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 96% atau variabel independent dapat mempengaruhi variabel dependent sebesar 96% ($0,962 \times 100\%$). Sedangkan sisanya sebesar 4% dipengaruhi oleh faktor lain, atau variabel lain yang menjelaskan variabel pertumbuhan ekonomi yang tidak diperhitungkan ke dalam model sebesar 4%.

2. Uji Regresi Linear Berganda

Hasil analisis regresi digunakan untuk melihat pengaruh antara variabel, melihat taraf signifikansi antar variabel serta hubungan antar variabel. Untuk melihat pengaruh variabel arus transportasi laut dan pengeluaran pemerintah kementerian perhubungan terhadap pertumbuhan ekonomi, berikut hasil regresi berganda:

Dari hasil pengujian maka menghasilkan :

$$Y = -7951934 + 1514719 X_1 - 108859 X_2$$

Dimana:

Constanta -7951934 artinya jika variabel independent yakni arus transportasi laut (X_1) dan pengeluaran pemerintah kementerian perhubungan laut (X_2) adalah tetap (konstan) maka variabel dependent atau variabel pertumbuhan ekonomi (Y) adalah menurun sebesar Rp.7.951.934.

βX_1 :Besarnya koefisien variabel arus transportasi laut (X_1) sebesar 1514719 yang berarti ketika arus transportasi laut meningkat sebesar 1% maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar Rp.1.514.719 dengan asumsi variabel lainnya konstan.

βX_2 :Besarnya koefisien variabel pengeluaran pemerintah kementerian perhubungan yakni sebesar 108859 yang berarti setiap peningkatan pengeluaran pemerintah kementerian perhubungan laut sebesar 1%, maka secara negatif akan mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar Rp.108.859 dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Berdasarkan hasil regresi berganda diatas menunjukkan bahwa variabel bebas yakni arus transportasi laut (X_1) positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) sedangkan pengeluaran pemerintah kementerian perhubungan laut (X_2) berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y).

a. Uji-F

Berdasarkan regresi, maka di dapat hasil sebagai berikut:
 $F_{hitung} = 25,243$

$Sig = .038$

Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ ($25,243 \geq 9,55$) pada tingkat kesalahan 5%, sedangkan nilai signifikansi menggunakan P value, dimana P value $< 0,05$ ($0,038 < 0,05$) dengan demikian hipotesis yang menyatakan arus transportasi laut (X_1) dan pengeluaran pemerintah laut (X_2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) berpengaruh signifikan secara *simultan*. Artinya bahwa hipotesis penelitian variabel arus transportasi laut (X_1) dan pengeluaran pemerintah (X_2) secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) diterima.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa transportasi laut dan pengeluaran pemerintah bersama-sama berpengaruh secara *simultan* terhadap pertumbuhan ekonomi.

b. Uji T

Hasil penelitian menunjukkan $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ ($4,051 \geq 3,18$) atau dapat dilihat pada p value $< 0,05$ atau nilai sig ($0,05 \leq 0,05$), dengan demikian variabel transportasi laut signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi diterima. Yang artinya transportasi laut berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan pola hubungan positif.

Hasil penelitian menunjukkan $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ ($-6,464 \leq 3,18$) atau dapat dilihat pada P value $< 0,05$ atau nilai sig ($0,023 \leq 0,05$), dengan demikian variabel pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi diterima. Yang artinya pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan dengan pola hubungan cenderung negatif.

Pengaruh Arus Transportasi Laut dan Pengeluaran Pemerintah Kemetrian

Perhubungan Secara *Simultan* Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa arus transportasi laut dan pengeluaran pemerintah kementerian perhubungan laut berpengaruh secara *simultan* terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang artinya bahwa ketika ada peningkatan dan penambahan dalam arus transportasi perhubungan laut dan pengeluaran pemerintah dari kementerian perhubungan laut maka dapat memacu pemasukan bagi daerah dan lebih maksimal maka secara bersama-sama dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah di Kota Tual.

Pengaruh Arus Transportasi Laut Secara *Parsial* Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa arus transportasi laut berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan pola hubungan positif. Artinya bahwa arus transportasi laut yang ada di daerah mampu mendorong kelancaran kegiatan ekonomi di daerah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Tual pada tahun 2016 hingga 2020.

Penelitian ini searah dengan penelitian yang dilakukan Jujun dkk (2020) yang menemukan bahwa jumlah transportasi berpengaruh signifikan namun dengan arah hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Transportasi erat kaitannya dengan tingkat produktivitas perekonomian daerah, dengan tingginya arus transportasi memacu peningkatan mobilitas masyarakat, mobilitas barang dan faktor-faktor produksi serta hasil pertanian di daerah. Sebagaimana di Kota Tual dengan daerah-daerah disekitarnya yang saling memenuhi kebutuhan

hidup masyarakatnya. Sebagai contoh pedagang yang berasal dari pulau Kei Besar maupun dari beberapa pulau-pulau di Kota Tual misalnya dari Kecamatan Tayando sebagai penghasil kelapa terbesar dan Kecamatan Pulau-pulau Kur, Kur Selatan sebagai penghasil perkebunan kopi, cengkeh, kenari dan lain-lain yang menjual hasil kebunnya di Kota Tual, minimnya bahan pangan sehingga perlu pasokan dari daerah luar.

Dampak dari adanya perkembangan transportasi tersebut sehingga memperluas jaringan perdagangan, karena sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani, nelayan dan pedagang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Arus transportasi pelayaran yang tinggi harusnya memberikan pengaruh pada sektor-sektor penting yang saling berkaitan dalam memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi dan produk domestik regional bruto di Kota Tual.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Kementerian Perhubungan Laut Secara *Parsial* Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah kementerian perhubungan laut berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang berarti bahwa pengeluaran pemerintah kementerian perhubungan laut mampu memacu pertumbuhan ekonomi atau produk domestik regional bruto di Kota Tual pada tahun 2016 hingga tahun 2020.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Landau (1986) dan Russek (1990) dengan pola yang sama yakni pengeluaran pemerintah terhadap

pertumbuhan ekonomi dengan pola hubungan yang cenderung negatif. Sedangkan beberapa penelitian lain yang menunjukkan signifikan antara kedua variabel tersebut namun dengan pola hubungan secara positif adalah Cheng (1997) dengan menggunakan pendekatan Vector Autoregressive (VAR) yang menemukan bahwa adanya pengaruh positif antara pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Korea Selatan, begitupula hasil penelitian Singh dan Sahni (1984), Alexiou (2009), Devarajan *et.al* (1996) dan Al Bataineh (2012).

Adapun hasil penelitian menemukan bahwa dengan besarnya alokasi anggaran kementerian perhubungan laut pada awal kegiatan tol laut sangat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan kondisi infrastruktur pelabuhan laut di Kota Tual, namun dapat terlihat bahwa dalam 4 (empat) tahun berikutnya alokasi anggaran kementerian untuk perhubungan laut di Kota Tual mengalami penurunan yang sangat drastis yakni sebesar Rp.24,7 Milyar hingga tahun 2020.

Selain itu, alokasi anggaran kementerian perhubungan laut bagi pembangunan infrastruktur di pelabuhan Kota Tual dapat memenuhi kebutuhan pelabuhan dalam memperlancar kegiatan perhubungan laut di pelabuhan Kota Tual. Distribusi anggaran kementerian perhubungan laut untuk pembangunan dapat memacu perkembangan dan kegiatan perekonomian daerah.

Kesimpulan

1. Variabel penelitian arus transportasi laut dan pengeluaran pemerintah secara *simultan* dapat mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Tual, yang berarti bahwa tingginya arus transportasi pelayaran dan pengeluaran pemerintah kementerian perhubungan laut dapat

mendorong kegiatan perekonomian sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Tual.

2. Variabel arus transportasi laut atau pelayaran secara *parsial* berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, yang berarti bahwa jumlah arus pelayaran ternyata telah mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produk domestik regional bruto di Kota Tual. Dengan lancarnya kegiatan perekonomian di daerah antar sektor-sektor yang saling berkaitan dan saling memenuhi kebutuhan antar sektor memacu lancarnya perekonomian daerah
3. Variabel pengeluaran pemerintah kementerian perhubungan laut secara *parsial* berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi namun pengaruhnya secara negatif, pagu anggaran yang besar bagi pembangunan sarana dan prasarana perhubungan laut, walaupun pada kenyataannya mengalami peningkatan yang besar bagi beberapa kecamatan, namun belum mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, 2006. Transportasi : Peran dan Dampaknya Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Wahana Hijau. Volume 1, No.3 April.
- Adisasmita Raharjo, 2010. *Dasar-Dasar Transportasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Alexiou, Constantinos (2009). Government Spending and Economic Growth: Econometric Evidence from the South Eastern Europe (SEE). *Journal of*

- Economic and Social Research*
Vol. 11, no. 1.
- Al Bataineh, Mohamed (2012). The Impact Of Government Expenditures On Economic Growth In Jordan. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In Business* Vol. 4, no. 6.
- Badan Pusat Statistik 2020. Kota Tual Dalam Angka
- Devarajan Shantayan, Swaroop Vinaya dan Fu Zou Heng (1996). The Composition of Public Expenditures and Economic Growth. *Journal of Monetary Economics* Vol. 37
- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, (2020). Info Maritim, Transportasi Laut Merajut Keberagaman dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi. Edisi 8
- Jujun Junaidi, Irwan Gani dan Akhmad Noor. 2020. Analisis Transportasi darat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur.
- Singh and Sahni (1984). "Causality *between* Public Expenditure and National Income", *Review of Economics and Statistics*.
- Widodo, Tri. 2006. Perencanaan Pembangunan dan Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah). Yogyakarta: Penerbit UPP STIM YKPN.